

No	Judul	NIM	Nama
1	KEWENANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN MELALUI JALUR NON LITIGASI	1510111149	RISQI BASYIROH MUZAYYANAH
2	KEBIKAKAN PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBER TERHADAP PENGGUNAAN ALARM GARIS BATAS SENSOR STROENE (STOP BEFORE THE LINE)	1410111005	FIAN YUDHA TRIHANDHIKA
3	KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM PENANGANAN FUNGSI GUMUK	1310111028	FARIS RAHMATULLAH
4	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DI KABUPATEN JEMBER	1410111078	MUSTAFIN CAHYA PERMADANI
5	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG DENGAN BERLAKUNYA PERMENKES NO.492/MENKES/PER/2010 TENTANG PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM 2019	1510111087	MUHAMMAD ALWIN APRILIAN
6	LAGALITAS KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN EMAS PT BUMI SUKSESINDO DENGAN MENGGUNAKAN ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG	1410111086	AHMAD ARIKA HUDAVA
7	TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO DALAM MEMPERTAHANKAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA JAVA IJEN RAUNG NO 23 TAHUN 2013	1310112005	BROTO PANJI WALUYO
8	IMPLEMENTASI KETENTUAN KLAUSULA BAKU PADA USAHA RITEL DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (1) HURUF b UNDANG UNDANG 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	1510111022	RISKA FATMALA DEWI
9	NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILU BERDASARKAN UNDANG UNDANG UNDANG RI NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA	1510111050	NINDI ANGGRAENI
10	EXISTENSI HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM PERDATA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	1510111118	RODIYAH RAHMAWATI
11	KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP PENGELOLA SAMOAH DI PEDESAAN	1410111051	MISBAHUL ANAM
12	TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP PENCEMARAN AIR LIMBAH HASIL USAHA PENGELOLA IKAN	1410111120	ANITA FAUZIATI
13	PENYESLESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG HASIL KORUPSINYA MENJADI OBJEK HAK TANGGUNGAN	1410112001	NURULAH AJI WULANDARI
14	TANGUNG GUGAT PERUSAHAAN OTOBUS JEMBER INDAH TERHADAP SPBU YANG TERBAKAR AKIBAT TERTABRAK BVUS JEMBER INDAH	1410112002	MILA ROSA
15	PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DALAM PERAKTEK PERADILAN	1510111019	SARI RAHAYU
16	KAJIAN YURIDIS TERHADAP KARYA CIPTA SENI TARI MALAYSIA YANG MEMILIKI KEMIRIPAN DENGAN SENI TARI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAKI	1510111024	NURITA INDAH SARI SATIABUDI

17	KEDUDUKAN DAN KEWENAGAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG UNDAN2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAEARAH	1510111110	ZALWA ANIS SOFIYA
18	TANGGUNG JAWAB TENAGA KELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL TERHADAP PASIEN	1210112005	ANISA KARTIKA FITHRI
19	PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI INTERNET ATAU ONLINE	1210112006	NUR NAFISAH RAMADHANY
20	KAJIAN YURDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN REKAMASI TELUK JAKARTA	1510111103	ARIP RIPALDI
21	KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN	1510111063	AGUNG SUSANTO
22	PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PELANGGARAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG	1510112001	BUDIONO FIRDAUS
23	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SITUBONDO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DAERAH	1510111015	VIRLA YALAS ANGGIA
24	TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM PROSES PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI	1510111048	BERLIANA MEIDY PUTRY
25	PERLINDUNGAN HUKUM PEJALAN KAKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI KABUPATEN JEMBER	1510111089	GITA NOVITA CAHYANI
26	LEGALITAS KERETA MINI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	1410111034	FERDINA MANDA MARINA
27	PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN JEMBER	1510111030	NIUR LITA OKTAVIANI
28	KEWENANGAN ANGGOTA BABINSA DAN BHABINKAMTIBMAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 73 TAHUN 2005 TENTANG KELURAHAN	1410111082	ELMY AYUNI QORINA PUTRI
29	ASPEK PERLINDUNGAN HAM DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA	1510111104	DWI KURNIA ANGGRAINI
30	SINKRONISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM	1510111106	LUCYANA ADI IRAWATI
31	TANGGUNG GUGAT PT PLN (PERSERO) TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI KONSUMEN AKIBAT PEMBERHENTIAN TURBIN OLEH PLTU PAITON	1410111035	ILFAD FIRDAUZI

32	KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN YANG BERSIFAT DISKRESI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	1510111061	FITRIA KUSDIANTARA
33	IMPLEMENTASI PASAL 124 UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) PADA PT.KAI (PERSERO) DI DAERAH OPERASIONAL (DAOP) IX JEMBER	1210112003	ANDRIAN YUDHA LAKSANA
34	PERTANGGUNGJAWABAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP TINDAK PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA	1510111023	YULIA EKA MAULANI
35	TINJAUAN YURISDIS STATUS CALON KEPALA DAERAH YANG TERJERAT KASUS PIDANA	1410111012	RENALKY AMRULLAH
36	IMPLEMENTASI KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI CALON ANGGOTA DPR. DPRD MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU	1510111047	FAISOL
37	KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKU USAHA HOME INDUSTRI YANG BEREDAR DI MASYARAKAT	1410111081	AULADI FAHMAN
38	KAJIAN YURISDIS KEDUDUKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN TAMBANG PASIR BESI DI DESA PASEBAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014	1310111039	ARDIANSYAH PUTRA PRATAMA
39	TINJAUAN YURISDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK CUKUP DIPERTIMBANGKAN (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD)	1410111003	HENDRA SUSANTO
40	IMPLEMENTASI PASAL 12 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	1510111099	ROHMAT BUDI PRASETYO
41	SISTEM INFORMASI PENJUALAN DO TOKO MOVELINE STORE	1400631020	M. RIZAL MAULIDIDANI
42	KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DALAM MELINDUNGI FUNGSI TANAH BANTARAN SUNGAI	1510111062	GUSTI MAHARDIKA ANGGARA PUTRA
43	HAK ASUH ANAK BIDANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN KARENA ISTRI PINDAH AGAMA (MURTAD)	1310111068	RIZKI BUDI UTOMO
44	JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI TENAGA KERJA PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) PADA MASA KERJA TAHUN 2016 SAMPAI 2018 DAERAH OPERASI IX JEMBER	1210111046	ELORENSIA REGINA
45	ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	1510111044	GAYUH DWI HERMAWAN
46	LEGALITAS SURAT PERNYATAAN DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA	1510111080	WILDA HABIBI

47	KAJIAN YURIDID PASAL 2 AYAH 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM	1410111091	BUYUNG FITRIANTO
48	TANGGUNG JAWAB PERAWAT DALAM MEMBERIKAN LAYANAN KESEHATAN PRAKTEK MANDIRI BERDASARKAN UNDNAG-UNDNAG NO 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN	1410111065	SURYA ALI PURNOMO
49	KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TERHADAP PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)	1410111040	SILVINIA HARISANTI
50	KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1510111090	BELLA NOVELLA ANGELLA PUTRI
51	HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMILIK APLIKASI LAYANAN TRANSPORTASI ONLINE DENGAN PENGEMUDI DALAM PELAKSANAAN LAYANAN JASA TRANSPORTASI	1410111052	AMIN MUTAWAKKIL
52	IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN JAMINAN KESEHATAN (PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL) TERHADAP PEGAWAI TIDAK TETAP DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER	1510111015	HIDAYATUR RAHMAWATI
53	TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN SEPARATISME DI INDONESIA	1510111042	MAHESA NOVARIO IRAWAN
54	IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISIBILITAS KABUPATEN JEMBER	1510111051	DARMAWAN RIZKI FAJAR
55	SINKRONITAS PERATURAN MENTERI ESDM NO 06 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 04 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA	1510111102	SHOFIAN DWI PUJO SANTOSO
56	IMPLEMENTASI PASAL 12 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008	1510111099	RAHMAT BUDI PRASTYO